

<u>RB General</u>		<u>100</u>		
a.	Strategi Pelaksanaan RB General	10		
	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0 - 100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh K/L, misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0 - 100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dipengaruhi oleh Nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General.
b.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40		
	Hard Element (Sasaran 1)	33		
	Kebijakan Percepatan	33		
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	0 - 100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). PSO = $\frac{A-B}{A-C}$ x 100%
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0 - 5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kategori I = 5 = 100% = telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya, menerapkan squad team, serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan /atau penyesuaian Standar yang telah ditetapkan pimpinan instansi; Kategori II = 4 = 80% = telah menetapkan sistem kerja di lingkungan yang menunjukkan keterkaitan antara Perjanjian Kinerja dengan pembagian tim kerja; Kategori III = 3 = 60% = telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya; Kategori IV = 2 = 40% = sedang dalam penyusunan draft pengaturan sistem kerja di lingkungan instansinya; Kategori V = 1 = 20% = telah terdapat dokumen yang menyatakan akan dilakukan penyusunan draft sistem kerja di lingkungan instansi; Kategori VI = 0 = 0% = tidak melakukan penyusunan draft sistem kerja di lingkungan instansi
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	1 - 5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0 - 3	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

A = jumlah struktur jabatan administrasi sebelum dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah; **B** = jumlah struktur jabatan administrasi setelah dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah; **C** = jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021

1) Penetapan sistem kerja dibuktikan dengan dokumen pengaturan (bukan Surat Edaran) instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah; **2) Penerapan squad team** dibuktikan dokumen Perjanjian Kinerja dengan pembagian tim kerja; **3) Penyesuaian proses bisnis dan /atau SOP** dibuktikan dengan dokumen proses bisnis dan/atau SOP yang telah ditetapkan mengacu pada sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi;**4) Penyusunan rancangan pengaturan sistem kerja** dibuktikan dengan dokumen rancangan sistem kerja di lingkungan instansi; **5)** Instansi yang telah menerapkan squad team dan menyesuaikan proses bisnis dan/ atau SOP tetap baru dianggap baru menyusun draft apabila **belum menetapkan pengaturan sistem kerja** di lingkungan instansinya; 6) Instansi yang belum melakukan penyederhanaan struktur organisasi mendapatkan nilai 0

5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	0 - 100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong telah tersedia ; 2) Kualitas (9%) : Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, 2) Terdapat dokumen perencanana kinerja jangka panjang; 3) Terdapat dokumen peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L. Penilaian yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) perencanaan jangka menengah; 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek; 5) dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	A. Perencanaan Kinerja (30%) dengan sub komponen : 1) Keberadaan (6%) ; Dokumen perencanaan A. Perencanaan Kinerja; a. Keberadaan ;1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja; 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang; 3) Terdapat dokumen perencanaan jangka menengah; 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek; 5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja; 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja; 7) Setiap uni satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja; b. Kualitas; 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan; 2) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu; 3) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu (15%) : Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta dicapai; 4) Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai; 5) Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART; dengan sub komponen : 1) Keberadaan (3%) : Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan 6) IKU telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara kinerja; 2) Kualitas (4,5%) : Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis); 7) atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan penyempurnaannya; 3) Pemanfaatan (7,5%) : Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar realistis; 8) Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan Kinerja Internal (25%) dengan sub komponen : 1) Keberadaan (5%) : Evaluasi akuntabilitas kinerja (cascading); 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, internal telah dilaksanakan; 2) Kualitas (7,5%) : Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah berkaitan (crosscutting); 10) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan :Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efesiensi kinerja.
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	0 - 100	Mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L Pusat; a) Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN perencanaan kinerja pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (19%); pengukuran kesesuaian subtansi dalam dokumen Renstra di masing-masing K/L dengan RPJMN; (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan 1) Pernyataaan visi Renstra K/L selaras visi RPJMN (2%) subtansi visi dalam dokumen rencana strategis masing-masing K/L memiliki keselarasan dengan subtansi visi dalam RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari asessor dan didukung oleh dokumen yang relevan; 2) Pernyataan Misi dalam Renstra K/L memiliki keterkaitan dengan misi RPJMN (2%) subtansi misi dalam dokumen rencana strategis	
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	0 - 5	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	0 - 100	Mengukur kualitas implementasi penyelenggaraan kearsipan pada K/L dalam rangka transformasi digital kearsipan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia).	
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	0 - 100	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Keuangan).	
10	Indeks Pengelolaan Aset	2	1 - 4	Mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian, serta keandalan administrasi pada K/L selaku pengguna barang. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Keuangan).	
11	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	1 - 5	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	
12	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	0 - 100	Mengukur kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh K/L pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi Negara).	
13	Indeks Reformasi Hukum	1,5	0 - 100	Mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).	
14	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	1 - 5	Mengukur kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik).	
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	0 - 100	Mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada K/L baik dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun sistem pengadaan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).	
Soft Element (Sasaran 2) Kebijakan Percepatan		7	7		

1	Indeks Sistem Merit	4	0 - 410	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara).
	Indeks Pelayanan Publik	1,5	0 - 5	Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI).
2	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	0 - 100	Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI).
3				
c. Capaian Sasaran Strategis RB		50		
Hard Element (Sasaran 1)		28		
1	Indeks SPBE	9	1 - 5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	Capaian Prioritas Nasional	3	0 - 100	Menghitung kinerja efektivitas output K/L dengan membandingkan capaian dan target RO yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Nilai Capaian Prioritas Nasional dipengaruhi oleh Nilai SAKIP dan Capaian Rencana Kerja Pemerintah.
2	Capaian IKU	7	0 - 100	Menghitung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan pada K/L dengan membandingkan Jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Capaian IKU dipengaruhi oleh Nilai SAKIP dan Capaian Rencana Kerja Pemerintah.
3	Opini BPK	5	WTP - TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
4	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	0 - 100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
5				
Soft Element (Sasaran 2)		22		
1	Indeks BerAKHLAK	4	0 - 100	Mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	Survei Penilaian Integritas	10	0 - 100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada K/L. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi).
2	Survei Kepuasan Masyarakat	8	0 - 100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
3				
RB Tematik		10		
a. Capaian RB Tematik		10		
1	Pengentasan Kemiskinan	2	0 - 100	
2	Realisasi Investasi	2	0 - 100	
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting	2	0 - 100	
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	0 - 100	
5	Laju Inflasi	2	0 - 100	

		2. Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA	50	Persentase dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Persentase dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	30	Persentase jumlah himpunan aspirasi masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas	Persentase jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	30	3863 AEA 003 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
							Persentase dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	70	Persentase hasil analisa kajian	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang	Persentase jumlah uji petik sesuai standar	50	3863 AEA 004 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
							Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	Persentase jumlah masukan sesuai standar	20	3864 AEA 003 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II			
										3864 AEA 004 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV			
										3864 BMB 001 Aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI			
										3962 ABC 001 Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah			
										3858 AEA 001 Pemasyarakatan Keputusan DPD RI			
										3858 AEA 002 Pertemuan/Konsultasi			
										3863 AAA 003 Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite I)			
										3863 AAA 006 Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu			
										3864 AAA 003 Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II)			
										3864 AAA 007 Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV			
										3864 AAA 008 Pertimbangan DPD RI atas calon Anggota BPK			
							3962 ABC 001 Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah						
							3863 AEA 001 Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan I						
							3864 AEA 001 Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan II						
							3864 ABC 001 Rekomendasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan Pemda						
							3864 ABC 002 Rekomendasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/daerah						
							3858 AEA 001 Pemasyarakatan Keputusan DPD RI3858						
							AEA 002 Pertemuan/Konsultasi						
							3863 AAA 011 Peraturan DPD RI						
							3863 AEC 001 Kerja sama antar Parlemen dan Lembaga Internasional						
							3864 ABC 005 Sidang Paripurna/Panmus/Pansus DPD RI						
Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	25	Persentase dukungan bahan dan keahlian hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat dan daerah	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Persentase dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	40	Persentase jumlah himpunan aspirasi masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas	Persentase jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	40	3863 AEA 003 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I			
				Persentase dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	60	Persentase hasil analisa kajian	Tersedianya masukan terhadap RUU Inisiatif	Persentase jumlah masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar	30	3863 AEA 004 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III			
Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	25	Persentase dukungan bahan dan keahlian hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat dan daerah	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Persentase dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	60	Persentase jumlah himpunan masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan	Persentase jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	60	3864 AEA 003 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II			
				Persentase dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	40	Persentase hasil analisa kajian	Tersedianya masukan atas perubahan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan kebijakan baru	Persentase jumlah masukan terhadap perubahan kebijakan sesuai standar	20	3864 AEA 004 Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV			
											3864 BMB 001 Aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI		
											3962 ABC 001 Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah		
												3858 AEA 001 Pemasyarakatan Keputusan DPD RI	
												3858 AEA 002 Pertemuan/Konsultasi	
												3863 ABC 001 Pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah	
												3863 ABC 002 Pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah	
												3863 ABC 004 Monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda atau perda	
												3863 AEA 001 Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan I	
												3863 AAA 011 Peraturan DPD RI	
												3864 ABC 005 Sidang Paripurna/Panmus/Pansus DPD RI	
												3863 ABC 003 Harmonisasi legislasi pusat – daerah	
												3863 AEA 005 Diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah	
		3. Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah	Nilai RB			Nilai RB General							
						Nilai RB Tematik							

Permasalahan Strategis Berdasarkan Aspek Peran DPD

	Aspek Peran	Permasalahan Strategis	Isu Strategis
1	Penyusunan RUU	1 Penentuan judul RUU untuk usulan masih belum tematik dan sesuai dengan kewenangan DPD dalam Konstitusi 2 Masih belum akuratnya usulan RUU dari Komite dengan Long List Prolegnas 2019 - 2024 3 Pengayaan normatif yang sedikit 4 Waktu pelaksanaan yang singkat dalam penyusunan kajian teknokratik 5 Waktu penyusunan RUU semula 6 bulan dipandang tidak memadai dengan terbitnya UU 13/2022 yang menuntut adanya kajian analisis dampak dan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembentukan UU 6 Pembentukan RUU secara elektronik belum diatur dengan peraturan 7 Tahapan penyusunan RUU tidak linear dengan pelaksanaan tahun sidang ataupun tahun anggaran, sehingga selalu penyusunan RUU dimulai pada Januari (MS III) dan berakhir pada bulan Juni (MSV) 8 Pembentukan di masing-masing alat kelengkapan yang ditugaskan dalam rapat tripartied 9 Dalam pembahasan RUU secara tripartit di DPR RI perlu mekanisme internal siapa saja yang terlibat dalam pembahasan, selain itu perlu juga kejelasan jumlah tim dari perwakilan DPD RI yang ikut pembahasan. 10 Belum adanya mekanisme baku/kesepemahaman antara DPR, DPD dan Pemerintah terkait pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI sesuai Putusan MK No 92/PUU- X/2012 dan No 79/PUU-XII/2014, khususnya terkait batasan penafsiran frasa OTONOMI DAERAH. 11 Belum adanya mekanisme dalam perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);	Belum optimalnya hasil RUU baru mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan aspirasi daerah
2	Pandangan dan Pendapat atas RUU	1 Adanya kontradiksi peraturan undangan-undangan (Pasal 246 UU MD3 dengan Pasal 4 pada Tatib DPD RI) dimana undang-undang mengcluster fungsi pandangan pendapat dengan pertimbangan dalam cluster yang berbeda yakni ayat 1 huruf (b) dan (c) sedangkan tatib mengclusterkan dalam fungsi legislasi sehingga perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan 2 Tidak adanya pejabat yang bertanggungjawab dalam mengkompilasi hasil pembahasan DIM akhir rancangan UU sebelum disahkan menjadi UU sebagai bahan untuk menghitung presentase DIM usul RUU DPD yang disetujui sebagai UU 3 Perlu adanya regulasi internal yang mengatur mengenai batas atas pandangan/pendapat RUU DPD untuk setiap tahun	Masih belum jelasnya pembagian RUU usul DPR dan Pemerintah yang akan disusun pandangan /pendapat
3	Pertimbangan atas rancangan UU	1 Adanya kontradiksi peraturan undangan-undangan (Pasal 246 UU MD3 dengan Pasal 4 pada Tatib DPD RI) dimana undang-undang mengcluster fungsi pandangan pendapat dengan pertimbangan dalam cluster yang berbeda yakni ayat 1 huruf (b) dan (c) sedangkan tatib mengclusterkan dalam fungsi legislasi sehingga perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan 2 Perlu adanya regulasi internal yang mengatur mengenai batas atas jumlah pertimbangan RUU DPD untuk setiap tahun	Masih belum jelasnya pembagian RUU terkait APBN, pajak, pendidikan, dan agama yang akan diberi pertimbangan
4	Pengawasan atas pelaksanaan UU	1 Peraturan DPD RI No 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPD RI perlu di review dikarenakan karena Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana terakhir Peraturan DPD RI No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib sehingga diharapkan dengan revisi peraturan DPD RI No 6 Tahun 2012 terjadi sinkronisasi antar Tata Tertib dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 2 Perlu diatur mekanisme/peraturan bersama antara DPD RI dengan DPR RI terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPD RI dikarenakan belum ada mekanisme yang mengatur	Tidak ada tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
5	Pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU	1 Pelaksanaan kegiatan masih berdasarkan UU dan Tatib DPD, belum ada instrument khusus yang dapat digunakan untuk menilai UU yang di tinjau 2 Tenaga fungsional Analisis Pemantauan (APUL) belum sepenuhnya dapat di efektifkan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan UU 3 Kegiatan ini belum di dukung dengan Tim Ahli untuk membantu perumusan hasil pemantauan dan peninjauan UU 4 Pelaksanaan kegiatan masih berdasarkan UU dan Tatib DPD, belum ada instrument khusus yang dapat digunakan untuk menilai UU yang di tinjau	Belum optimalnya pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
6	Pengawasan terhadap penyelenggaraan haji	5 DPD RI tidak diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasannya dan hanya menyampaikan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan haji kepada DPR RI.	Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan haji
7	Pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerja migran indonesia	1 Belum ada dasar hukum/argumentasi yang memberikan justifikasi bahwa DPD dapat melakukan Pengawasan atas Penempatan PMI di Luar Negeri. Sebagaimana disebutkan dalam UU 18 Th 2017 tentang PPMI. Ps 45 huruf a angka 2 bahwa salah satu tugas Menteri a/ pengawasan penyelenggaraan penempatan. Ps 47 UU PPMI, bahwa salah satu tugas Kepala Badan (BP2MI), melayani dan melindungi PMI, melaksanakan penempatan dan Pelindungan PMI melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan. Bahkan dalam BAB VIII tentang Pembinaan & Pengawasan, disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan adalah Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah. Lebih teknis, disebutkan dalam PP No 59 Th 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI. PP tersebut mengatur terkait pembagian urusan pelaksanaan pelindungan PMI antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.	Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan pekerja migran indonesia
8	Pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda	1 Lembaga mitra belum memahami bahwa DPD RI mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah 2 Lembaga mitra belum memahami bahwa DPD RI dapat meminta penjelasan mengenai tindak lanjut atas Keputusan DPD RI mengenai hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah	Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi atas produk-produk perundang-undangan daerah (raperda dan perda) dalam rangka harmonisasi dan penjaringan aspirasi daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis			Sasaran Program			Sasaran Kegiatan																					
		Uraian	IKSS	Penjabaran Operasional	Uraian	IKP	Penjabaran Operasional	Uraian	IKK	Penjabaran Operasional																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																			
Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah	RUU Inisiatif yang ditetapkan menjadi UU sesuai yang ditetapkan dalam prolegnas	1. Meningkatkan kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU	Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	40	Persentase dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU	Persentase dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar	60	Persentase jumlah himpunan aspirasi masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas	Persentase jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	60	Anggota DPD RI	80	Reses	40	Ya	40											
															Kundapil	30	Ya	30											
															Kunker	30	Ya	30											
														Kantor DPD RI	20	Kantor DPD RI di Ibukota Negara	50	Ya	50										
																Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	50	Ya	50										
							Persentase dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar	40	Persentase hasil analisa kajian - NA	Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar	Persentase jumlah kajian - Naskah Akademik sesuai standar	20	Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketata negaraan	20	Ya	20													
																	Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah	20	Ya	20									
																					Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost Benefit Analysis (CBA)	20	Ya	20					
														Stakeholder Engagement	20	Ya									20				
																	Finalisasi NA oleh Tim Perumus	20	Ya	20									
																					Persentase jumlah rumusan RUU	Tersusunnya rumusan rancangan UU	Persentase pelaksanaan uji sahah dan finalisasi RUU	20		Uji sahah NA dan draf RUU dengan kalangan akademisi	50	Ya	50
									Finalisasi RUU	50	Ya	50																	
													Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	20	Persentase dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah dan DPR	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Persentase dukungan bahan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar	70	Persentase jumlah himpunan aspirasi masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas	Persentase jumlah aspirarasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	70	Anggota DPD RI	80	Reses	40	Ya	40	
			Kundapil	30	Ya	30																							
			Kunker	30	Ya	30																							
			Kantor DPD RI	20	Kantor DPD RI di Ibukota Negara	50	Ya	50																					
					Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	50	Ya	50																					
			Persentase dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standa	30	Persentase hasil analisa kajian	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar	Persentase jumlah kajian sesuai standar	30	Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan	20	Ya	20																	
																	Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah	20	Ya	20									
																					Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost Benefit Analysis (CBA)	20	Ya	20					
										Stakeholder Engagement	20	Ya													20				
																	Finalisasi NA oleh Tim Perumus	20	Ya	20									
																					Persentase dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN	70	Persentase jumlah himpunan aspirasi masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas		Persentase jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	70	Anggota DPD RI	80
					Kundapil	30	Ya	30																					
					Kunker	30	Ya	30																					
					Kantor DPD RI	20	Kantor DPD RI di Ibukota Negara	50	Ya	50																			
							Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	50	Ya	50																			
					Persentase dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standa	30	Persentase hasil analisa kajian	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar	Persentase jumlah kajian sesuai standar	30	Kajian RKP	10					Ya	10											
																			Kajian KEM - PPKF										
																			Kajian RUU APBN										
												Kajian RPJMN					10	Ya	10										
			Kajian RPJPN	10									Ya	10															
			Kajian APBN-P												10	Ya				10									
			Finalisasi perumusan kajian oleh Anggota DPD RI		40	Ya	40																						
			Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai pajak, pendidikan dan agama	20	Persentase dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai pajak, pendidikan dan agama	Persentase dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai pajak, pendidikan dan agama sesuai standar	70	Persentase jumlah himpunan aspirasi masyarakat	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas	Persentase jumlah aspirarasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	70	Anggota DPD RI	80	Reses	40	Ya	40											
															Kundapil	30	Ya	30											
															Kunker	30	Ya	30											
														Kantor DPD RI	20	Kantor DPD RI di Ibukota Negara	50	Ya	50										
																Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	50	Ya	50										
							Persentase dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai pajak, pendidikan dan agama sesuai standar	30	Persentase hasil analisa kajian	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar	Persentase jumlah kajian - Naskah Akademik sesuai standar	30	Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan	20	Ya	20													
																	Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah	20	Ya	20									
RIA dan CBA	20	Ya																			20								
														Stakeholder engagement	20	Ya						20							
																	Finalisasi NA oleh Tim Perumus	20	Ya	20									

						Nilai Max	Nilai	Nilai Bobot	
RB General			100					61,8278	
a.	Strategi Pelaksanaan RB General		10					6,9784	
		Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0 - 100		100	2,5	0,075	
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0 - 100		100	98,62	6,9034	
b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			40					20,815	
Hard Element (Sasaran 1)			33					16,204	
Kebijakan Percepatan			33					16,204	
	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	0 - 100		100	70,21	1,4042	
	2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0 - 5		5	2	0,8	
	3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	1 - 5		5	3,007	2,4056	
	4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0 - 3		3	0,5	0,5	
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	0 - 100		100	67,07	2,6828	
	6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	0 - 100		100	94,35	1,887	
	7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	0 - 5		5	2	0,8	
	8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	0 - 100		100	86,99	1,7398	
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	0 - 100		100	95,85	1,917	
	10	Indeks Pengelolaan Aset	2	1 - 4		100	3,65	0,073	
	11	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	1 - 5		5	0	0	
	12	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	0 - 100		100	65	0,975	
	13	Indeks Reformasi Hukum	1,5	0 - 100		100	0	0	
	14	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	1 - 5		5	1,48	0,444	
	15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	0 - 100		100	28,78	0,5756	
Soft Element (Sasaran 2)			7					4,611	
Kebijakan Percepatan			7					4,611	
	1	Indeks Sistem Merit	4	0 - 400		400	342	3,42	
	2	Indeks Pelayanan Publik	1,5	0 - 5		5	3,97	1,191	
	3	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	0 - 100		100	0	0	
c. Capaian Sasaran Strategis RB			50					34,0344	
Hard Element (Sasaran 1)			28					17,9308	
	1	Indeks SPBE	9	0 - 5		5	2,24	4,032	
	2	Capaian Prioritas Nasional	2	0 - 100		100	97,14	1,9428	
	3	Capaian IKU	8	0 - 100		100	83	6,64	
	4	Opini BPK	5	WTP - TMP		5	5	5	
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	0 - 100		100	7,9	0,316	
Soft Element (Sasaran 2)			22					16,1036	
	1	Indeks BerAKHLAK	4	0 - 100		100	57,2	2,288	
	2	Survei Penilaian Integritas	10	0 - 100		100	72,02	7,202	
	3	Survei Kepuasan Masyarakat	8	0 - 100		100	82,67	6,6136	
								192,3416	
RB Tematik			2					2	
a.	Capaian RB Tematik		2					2	
	1	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)							
	2	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)							
	3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)							
	4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	0 - 100		100	67,75	1,355	
	5	Laju Inflasi (Capaian Dampak)							